

PHBS Paling Efektif Mencegah Frambusia

WONOSARI (KR) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul dr Dewi Irawati mengungkapkan, perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi kunci dalam pencegahan penyakit Frambusia atau patek. Selain itu perlu untuk menyediakan sanitasi air bersih. Menghindari kontak langsung dengan luka penderita. "Bahkan penanganan kini juga bisa dilakukan pada semua puskesmas di Gunungkidul," kata Kepala Dinkes Gunungkidul dr Dewi Irawati usai acara penilaian dari Kementerian Kesehatan yakni Tim Penilai Eradikasi Frambusia di Ruang Handayani Pemkab Gunungkidul, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan ini dihadiri Tim Penilai Kementerian Kesehatan,



KR-Dedy EW
dr Dewi Irawati menyampaikan pemaparan.

Sekda Gunungkidul, Kepala Dinas DIY dan seluruh puskesmas. "Diungkapkan, penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penanganan frambusia. Untuk di Gunungkidul sudah banyak dilaksanakan penyuluhan, baik dinas, puskesmas menasar masyarakat dan sekolah. Jika memang ada indikasi langsung dilakukan pen-

anganan." Selama dua tahun terakhir di Gunungkidul bebas frambusia. Pada 2022 lalu sempat ditemukan dugaan, tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut hasilnya negatif," imbuhnya.

Dewi menambahkan, sebanyak 30 puskesmas di Gunungkidul secara aktif melakukan upaya sosialisasi, pencegahan dan penanganan. (Ded)

LUSTRUM KE- 8 SMAN 1 KARANGMOJO Tidak Tertinggal Sekolah Kota Wonosari



KR-Endar Widodo

Siti Zumrotul Arifah MPd serahkan potongan tumpeng ke Tukiman SPd MT

WONOSARI (KR) - Kepala Balai Pendidikan Menengah (Baldikmen) Gunungkidul Tukiman SPd MT memberikan apresiasi atas kemajuan dan banyaknya prestasi SMA Negeri 1 Karangmojo pada usianya ke 40 tahun. Dalam prestasi akademik sekolah yang ber-

ada di wilayah timur Gunungkidul ini tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah dalam Kota Wonosari. Selain sekolah penggerak dan unggul, juga mengembangkan kewirausahaan dan juga menyandang sekolah Adiwiyata tingkat nasional.

Hal tersebut dikatakan dalam resepsi Lustrum ke-8 SMAN 1 Karangmojo di Gedung Serbaguna sekolah tersebut, Kamis (9/11). Acara dengan tema, Sengkut Tandang Gawe Guyub Nyawiji ini dihadiri Penewu dan Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimka), para alumni kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan tamu undangan lainnya.

Kepala SMAN 1 Karangmojo Siti Zumrotul Arifah SPd MPd dalam sambutannya, menyampaikan serangkaian kegiatan lustrum sudah dilakukan beberapa hari sebelum resepsi. (Ewi)

SATLANTAS POLRES KULONPROGO

Tindak 402 Kendaraan Knalpot Brong

WATES (KR) - Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kulonprogo melaksanakan penindakan terhadap 402 kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong selama periode 1 Oktober 2023 hingga 8 November 2023.

Kasat Lantas Polres Kulonprogo, AKP Johan Rinto Damarjati SH MM, Kamis (9/11) mengatakan, razia knalpot brong ini sebagai upaya cipta kondisi agar tercipta situasi yang kondusif, tertib berlalu lintas dan memberi rasa nyaman di masyarakat, khususnya jalur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penertiban pelanggaran kasat mata khususnya kendaraan menggunakan knalpot brong ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat akibat kebisingan yang ditimbulkan dari kendaraan knalpot brong.

"Dari awal Oktober hingga awal November ini kami mengamankan 402 kendaraan menggunakan knalpot brong. Sepeda motor bisa diambil pemiliknya, dengan syarat harus diganti dengan knalpot yang asli. Sampai saat ini ada 303 ken-

daraan sudah diganti knalpot standar dan 99 kendaraan belum diganti knalpot standar," kata AKP Johan Rinto.

Pihaknya mengimbau masyarakat Kulonprogo untuk tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong karena suara bising yang keluar dari knalpot brong mengganggu kenyamanan pengendara di jalan umum maupun masyarakat. (Dan)

FGD Pengendalian Inflasi Tinggi

WATES (KR) - Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kulonprogo dan Kerjasama Antar daerah untuk Pengendalian Inflasi, di Ruang Rapat Sermo Kompleks pemkab setempat, Rabu (8/11).



KR-Asrul Sani

Pj Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti (tengah) menghadiri FGD.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setda Kulonprogo Ir Adnan Widodo MT mengatakan, pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Peran serta daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang masih dipengaruhi gejala di sisi pasokan atau *supply side shocks*.

"Tujuan FGD di antaranya menyegarkan kembali

pemahaman tentang inflasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta upaya pengendalian inflasi di Kulonprogo yang telah dan akan dilakukan, kemudian peninjauan kerja sama antardaerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah," jelas Adnan.

Sementara itu Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti MT menjelaskan, pergerakan inflasi yang signifikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (*administered prices*) dan lonjakan harga komoditas pangan (*volatile foods*).

"Mau tidak mau kita bicara *volatile foods*, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi inflasi. Faktor yang menguatkan itu *volatile foods* selain *administered prices*. *Volatile foods* banyak didukung oleh aktivitas pertanian dan perdagangan," ujar Ni Made.

Salah satu penyebab tingginya harga beberapa bahan pokok, rantai distribusi yang panjang membuat pendapatan petani tidak sebesar harga yang beredar di pasaran.

"Aspek kelembagaan petani, belum memiliki posisi nilai tawar yang kuat serta panjangnya rantai distri-

busi produk pertanian membuat harga komoditas cenderung tidak stabil. Karena memang tidak memiliki kekuatan untuk mengatur," katanya.

Sehingga regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kestabilan harga komoditas yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi.

"Regulasi penting, sejauh mana penguatan terhadap kebijakan-kebijakan sektor pertanian dan produk-produk pertanian kita jaga. Sejahtera mana kita bisa memanfaatkan produk kita dan juga sejauh mana kita bisa bekerjasama antardaerah," ujarnya.

Ditegaskan, koordinasi yang solid di antara para penentu kebijakan publik di daerah akan menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. (Rul)

JDIH BIRO HUKUM DIY BEKERJASAMA DENGAN KOMISI A DPRD DIY

Jaga Kerukunan Warga dan Lestarikan Nilai Budaya Masyarakat

TERJAGANYA kerukunan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu manfaat dari implementasi ideologi Pancasila. Sebagai daerah setingkat provinsi yang heterogen, penerapan Pancasila di tengah masyarakat mempererat kehidupan bermasyarakat warga.

Terwujudnya masyarakat yang rukun selama ini, menjadi salah satu alasan DPRD DIY berinisiatif membuat Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2022, Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. "Ingin terjaga kerukunan di DIY, menjadi alasan hadirnya Perda tersebut," ungkap mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Agung Supriyono, SH yang hadir menjadi Pembicara dalam Sosialisasi Perda No 1/2022 di Gedung unit IX lantai 3, Kepatihan, Kamis (9/11).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Biro Hukum (JDIBH) Setda DIY dengan Komisi A DPRD DIY. Kegiatan pada Kamis (9/11) di Gedung IX lantai 3 terdiri dari 2 sesi.

Untuk sesi pertama tentang sosialisasi Perda No 1/2022 dengan peserta PKK Kelurahan Wirogunan dan sesi 2 tentang Perdas No 3/2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan peserta Kelurahan Keparakan. Adapun narasumber lain yang tampil, Budayawan Achmad Charris Zubair dan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto ST MSi. Acara sosialisasi dipandu moderator Analisis Hukum Muda Biro Hukum Setda DIY, Suhasto Nugroho.

Menurut Agung Supriyono, kehidupan masyarakat Yogyakarta yang rukun selalu tak lepas dari jejak para pendahulunya dan jejak kota dan daerah Yogyakarta. Sebelumnya, di zaman pra kemerdekaan, menjadi bagian tempat tumbuhnya pergerakan kemerdekaan. Sering menjadi tempat pertemuan para gerakan kemerdekaan, baik itu Budi Utomo, Kongres Perempuan dan Taman Siswa dan tumbuhnya Organisasi Muhammadiyah.

Menurut Agung, hadirnya Perda DIY No 1/2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kian memper-

kokoh status keistimewaan DIY. Dengan upaya menjaga dan menggelorakan nilai Pancasila. Apalagi saat ini para generasi muda, ada kecenderungan mulai tidak mengenal Pancasila, sehingga keberadaan Perda ini kian dibutuhkan.

Dihadapan peserta yang berasal dari Ibu-ibu PKK Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta, Agung banyak memaparkan sejumlah poin tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Salah satunya menguatkan diri pada keimanan, sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persatuan Bangsa

Disamping juga memupuk rasa kemanusiaan dan keadilan dengan penguatan persatuan bangsa. Persatuan yang telah terbangun di DIY diharapkan terus di jaga.

Agung kepada para ibu-ibu PKK mengungkapkan peran masyarakat DIY dan Kraton dalam perjuangan kemerdekaan. Sekaligus juga mendapat status sebagai Daerah Istimewa.

Peran masyarakat Yogyakarta dan Sultan Hamengku Buwono X di awal kemerdekaan begitu besar. Termasuk diantaranya ikut membantu pembi-



KR-Istimewa

Eko Suwanto, Agung Supriyono, Ahmad Charris Zubair dan Suhasto Nugroho.

ayaan para pegawai pemerintah yang baru merdeka, termasuk para menteri.

Dalam sesi 2, Ahmad Charris Zubair mengungkapkan banyak tentang nilai-nilai kebudayaan sebagai istimewanya Yogyakarta. Menurutnya, kebudayaan yang ditunjukkan dan dilestarikan, tidak semata-mata hanya tari-tarian.

Menurutnya, kebudayaan setidaknya ada 4 sub sistem. Salah satunya, subsistem nilai budaya itu adalah sesuatu yang belum konkrit, seperti abstrak. "Sesuatu yang menghidupkan kita, yang bernilai dalam hidup ini. Wong Jowo Islam, ada sesuatu yang harus di jaga harmoninya, yakni kita sebagai makhluk dengan Tuhan. Selain itu srawung dengan sesama, dan menjaga dengan alam seki-

ternya," ungkap Charris Zubair.

Dijelaskan, harmoni yang terjaga, akan melahirkan aturan-aturan, tata krama, dan aturan pergaulan itu mempengaruhi karakter masyarakat Jogja. Sehingga mendorong lahirnya budaya Yogyakarta.

"Faktanya, seperti paradox, kayak berlawanan. Seperti DIY itu daerah termiskin, no 3 dari bawah di Indonesia. Hitungan, Jogja punya angka kemiskinan 11,3 persen, lebih tinggi dari rata 9,6 persen nasional. Sehingga jadi olok-olokan, *wong Jogja akeh here*. Anehnya. Kok angka kebahagiaan orang Yogyakarta justru tinggi, yakni 71,7 persen lebih tinggi rata nasional 70,4 persen," ungkap Charris Zubair.

Karena seperti itu, apa-

kah cara menghitungnya perlu dikritisi? Atau karena wong Jogja memiliki budaya menjunjung tinggi kesederhanaan dan kehati-hatian. "Wong Jogja biasa hidup sederhana, bersahaja, tidak mudah membelanjakan uangnya," ujarnya.

Namun akibat kebiasaan itu, wong Jogja sedikit belaja, tidak begitu saja mudah mengeluarkan uangnya untuk belanja. Karena sedikit belanja, dikategorikan miskin.

Jujur

Sedangkan Eko Suwanto kepada para peserta menilai bahwa nilai budaya yang melekat sehari-hari di masyarakat Yogyakarta, adalah kejujuran. Eko mencontohkan sumbangsih ibu-ibu di Posyandu yang luar biasa. Ibu-ibu yang menjadi petugas Pos Yandu.

"Ketika mencatat pertumbuhan bayi, dan juga berapa kebutuhan gizinya, angka yang ditulis di buku, sesuai. Jujur," ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan memberi contoh kejujuran yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ibu-ibu PKK.

Karena itu, budaya jujur yang biasa terjadi di Yogyakarta harus terus dilestarikan. Tidak hanya dalam pelayanan Pos Yandu, tetapi dalam kegiatan sehari-hari.

Contoh lain, kegiatan arisan yang sering digelar ibu-ibu. Kejujuran yang ditunjukkan, misalnya dalam pengelolaan keuangan arisan, hingga penentuan yang mendapat lebih dahulu.

Dalam kesempatan itu juga Eko Suwanto mengingatkan peran keluarga dalam membentuk karakter anak-anak. Salah satunya bagaimana anak-anak dekat pada kedua orang tuanya. Sehingga jika mencurahkan hatinya, persoalan yang dihadapi, kepada orang tua. Jangan sampai anak justru curhat di medsos. Dalam kesempatan itu, Eko Suwanto berdialog dengan Ibu PKK Keparakan. Dialog dilakukan karena adanya kemampuan digital marketing yang dimiliki peserta. Dialog tersebut tujuannya karena ingin menunjukkan peran aktif peserta dalam membangun pasar digital. (*)-f



KR-Istimewa

Suasana sosialisasi tentang produk hukum DIY.



KR-Istimewa

Peserta dari PKK Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta menjelaskan mengenai digitalisasi bisnisnya kepada Eko Suwanto